

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 67 TAHUN 2018
DI KABUPATEN BANJAR**

Muhammad Yusrizal Apriyadi¹, Dewi Merdayanty², Junaidy³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63101, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 19120174

²Ilmu Administrasi Publik, 63101, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 1104017302

³Ilmu Administrasi Publik, 63101, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 1102088702

E-mail: yusrizalapriyadi@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu implementasi dari adanya kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 adalah menyangkut pelaksanaan tera dan tera ulang pada alat ukur BBM terkait SPBU, keberadaan SPBU menjadi sangat penting dalam penyediaan BBM yang diperlukan oleh masyarakat.

Jenis penelitian : adalah Kualitatif yang dideskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat. Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara, Observasi atau pengamatan dan Dokumentasi Jenis Data yaitu : Data Sekunder dan Data Primer Teknik Analisis Data : Editing, Tabulating, Analiting dan Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan.

Mengacu pelaksanaan penelitian juga analisis pembahasan dengan termuat terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 Di Kabupaten Banjar pada pelayanan tera dan tera ulang takaran pompa ukur BBM di SPBU, dengan hasil sebagai berikut : (1). Komunikasi yang dilaksanakan untuk pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga implementasi kebijakan dapat diterapkan dengan baik; (2). Sumberdaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tera dan tera ulang, dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3). Disposisi yang diperlukan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang, dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4). Struktur birokrasi yang ada saat ini dalam mendukung pelaksanaan tera dan tera ulang, sehingga dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (5). Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang takaran pompa ukur BBM di SPBU antara lain terbatasnya anggaran yang dimiliki, lemahnya kompetensi pejabat fungsional, kurangnya sosialisasi, terbatasnya sosialisasi, kurangnya pencapaian PAD dan kurangnya dukungan pimpinan daerah dalam pelaksanaan tera dan tera ulang.

Kata Kunci : Implementasi dan Kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution Az.. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta:Diadit Media. hlm .26
- Siagian.2001. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Bina Aksara. Hal.128-12 9
- Sinambela, Lijan Poltak,dkk.2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta :Bumi Aksara.Hal.5
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri (PKPDN) 2013. *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*. www.bppp.kemendag.go.id, akses 25 Desember 2017. 13:00AM
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (BPPP). 2007. *Kajian Sistem Metrologi Legal*. www.bppp.kemendag.go.id, acces 26 Desember 2017. 08:00AM